

ABSTRAK

Kabupaten Lampung Selatan memiliki kekayaan tambang batu salah satunya batu andesit. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan pengusaha berani untuk menanamkan modal agar dapat mendirikan perusahaan tambang batu di Kabupaten ini. Tidak terkecuali PT. XYZ. Tetapi pelaku usaha PT.XYZ tidak memperhatikan lokasi untuk didirikannya kegiatan pertambangan yang telah diatur dalam Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan. kegiatan pertambangan batu andesit PT.XYZ beroperasi pada lahan yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan pertanian lahan kering.

Permasalahan dalam penelitian yaitu bagaimana implementasi alih fungsi lahan pertanian lahan kering menjadi kawasan pertambangan di Kecamatan Bakauheni berdasarkan Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan Bagaimana penegakan hukum administratif berdasarkan UUPPLH terhadap pihak yang melakukan alih fungsi kawasan pertanian lahan kering menjadi pertambangan di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti bahan hukum sekunder yang terdiri bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan metode analisis menggunakan yuridis kualitatif serta menggunakan penafsiran sistematis untuk menghubungkan-hubungkan perundang-undangan yang lebih dari satu.

Hasil penelitian menyimpulkan alih fungsi lahan pertanian lahan kering yang dilarang oleh Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan untuk berada pada kawasan peruntukan pertanian lahan kering yaitu kegiatan yang menimbulkan potensi pencemaran lingkungan, memutus jaringan irigasi, kegiatan pembangunan selain yang berhubungan dengan pertanian. Faktanya pada sebagian kawasan peruntukan pertanian lahan kering di kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan telah dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan, yang merupakan kegiatan melanggar ketentuan Perda RTRW Kabupaten Lampung Selatan. Penegakan hukum administratif berdasarkan UUPPLH menyebutkan bahwa pejabat yang berwenang dapat menerapkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang tidak memiliki izin lingkungan. Terhadap faktanya kegiatan pertambangan batu andesit PT.XYZ hingga saat ini belum mengantongi izin lingkungan. Sanksi administratif yang dikenakan kepada PT. XYZ yaitu teguran tertulis dan paksaan pemerintah. Pemerintah daerah belum menerapkan sanksi administratif pada PT. XYZ yang melakukan kegiatan pertambangan pada kawasan peruntukan pertanian lahan kering.

Kata kunci: Alih Fungsi, Kawasan Peruntukan Pertanian, Penegakan Hukum Administratif

ABSTRACT

South Lampung regency has a wealth of mining stones one of the stones. This is one of the reasons businessmen dare to invest capital to establish the company mine the stones in this District. No exception PT. XYZ. But the perpetrator of PT.XYZ does not pay attention to the location for the establishment of the mining activities that have been arranged in Perda RTRW of . mining activity batu andesit PT.XYZ operates on land that is designated as the allotment of dryland farming.

Problems in the study, namely how the implementation of the function How the implementation of agricultural land conversion of dry land into a mining region in the District of Bakauheni under Regulation No. 15 Year 2012 on the spatial plan of Regency of South Lampung and how the enforcement of administrative law based on UUPPLH against parties who perform over the function of the area of dry land agriculture into mining in Bakauheni in South Lampung Regency.

This research method using a normative juridical approach by examining secondary legal materials consisting of primary legal materials secondary legal materials and tertiary legal materials with the specifications of the research using descriptive analytical. Data collection techniques used in this research is literature study and the method of analysis using qualitative juridical as well as using a systematic interpretation to connect the laws of more than one.

The results of the study concluded that the conversion of dry land agricultural land which is prohibited by the General Conditions of Zoning Regulations on RTRW Regional Regulation in South Lampung Regency to be in the area of dry land agriculture designation is activities that give rise to potential environmental pollution, cut off irrigation networks, development activities other than those related to agriculture. The fact is that in some areas of dry land agriculture allotment in Bakauheni sub-district, South Lampung Regency has been utilized for mining activities, which are activities violating the South Lampung Regency RTRW regulation. Administrative law enforcement based on the UUPPLH states that authorized officials can apply administrative sanctions to businesses that do not have an environmental permit. Due to the fact that PT. XYZ andesite stone mining activities up to now have yet to obtain environmental permits. Administrative sanctions imposed on PT. XYZ namely written warning and government coercion. The regional government has not yet applied administrative sanctions to PT. XYZ which carries out mining activities in the area of dry land agriculture allotment.

Keywords: *Conversion, Agricultural Allotment Areas, Administrative Law Enforcement*